

BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini terdiri dari :
 - a. Lampiran I meliputi :
 1. Satuan Biaya Honorarium;
 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor; dan
 4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.
 - b. Lampiran II meliputi :
 1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 3. Satuan Biaya Konsumsi; dan
 4. Satuan Biaya Pemeliharaan;
- (3) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, standar harga satuan daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar sepanjang dilandasi prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran, itikad baik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah.

Pasal 3

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

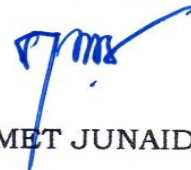
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal : 7 November 2022

BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan : di Sampang
Pada tanggal : 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,



YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR: 98

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor; dan
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.

Standar harga satuan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.1.1. Pejabat Pengguna Anggaran (PA)

- Dalam hal tugas PA mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tugas dan wewenang PA mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PA dapat melimpahkan sebagian tugasnya dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa kepada KPA.
- Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA, PA tetap menandatangani SPM UP/GU dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja yang didanai dari UP/GU.

- PA menetapkan semua Pemilihan Penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultan dan/atau jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Untuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yakni RSUD, maka seluruh ikatan/kontrak pengadaan barang dan jasa dapat dilimpahkan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB selaku PA kepada KPA UOBK;

1.1.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada masing-masing KPA diusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- Tugas dan wewenang KPA mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - KPA Pada Perangkat Daerah Badan/Dinas /Inspektorat, dijabat oleh Sekretaris.
 - Apabila sekretaris merangkap sebagai Plt Kepala Badan/Dinas /Inspektorat, maka dapat menunjuk salah satu Pejabat eselon III.
 - Pada unit/bidang SKPD yang mengelola anggaran kegiatan fisik lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan tersebar pada lebih dari 20 (dua puluh) lokasi dapat ditunjuk 1 (satu) KPA tersendiri.
 - KPA Pada Perangkat Daerah Sekretariat daerah, dijabat oleh Kepala Bagian sesuai bidangnya.
 - KPA Pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, dijabat oleh salah satu Pejabat Eselon III.
 - Kepala Puskesmas, Direktur RSUD dan Lurah menjadi KPA pada Unit Kerja yang dipimpinnya,

kecuali apabila Direktur RSUD bukan ASN, maka KPA adalah Pejabat Keuangan.

- Pada Perangkat Daerah Kecamatan dan Kantor, tidak ditunjuk KPA.

1.1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan (PPTK)

- PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrator sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- PPTK merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas
- Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas
- Dalam hal tidak terdapat Pegawai/ASN yang menduduki jabatan struktural (administrator/pengawas), PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- Tugas PPTK mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penunjukan PPTK memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Penunjukan PPTK harus memperhatikan nilai total anggaran kegiatan yang dikelola (tidak seluruh Pejabat eselon III menjadi PPTK)
 - Apabila nilai total anggaran kegiatan yang dikelola kurang dari Rp.150.000.000,00, maka tidak perlu ditunjuk PPTK (dirangkapkan pada PPTK lain)
 - Minimal nilai total anggaran kegiatan yang dikelola sebesar Rp.150.000.000,00 dapat ditunjuk satu PPTK
 - Apabila nilai total anggaran kegiatan pada unit SKPD melebihi 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan tersebar pada lebih dari 20 (dua puluh) lokasi, dapat ditunjuk 2 (dua) PPTK.
- Besaran honorarium PPTK, dihitung berdasarkan range jumlah total anggaran kegiatan yang dikelola.

1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

- Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD yang merupakan pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat/pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

- Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD, yakni Petugas Akuntansi dan Petugas Verifikasi Dokumen.
- Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dapat membentuk PPK tersendiri.
- Tugas dan wewenang PPK SKPD dan PPK UOBK mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

- jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

1.1.5 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

- Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, yang diatur sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran SKPD dibantu satu orang yang bertugas sebagai pembuat dokumen dan merekap potongan gaji ASN.
- b. Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas pendidikan dibantu dua orang yang bertugas sebagai pembuat dokumen dan operator gaji.
- c. Bendahara Pengeluaran SKPD BPPKAD dibantu dua orang yang bertugas sebagai pembuat dokumen dan merekap potongan gaji ASN serta Juru Bayar Insentif Pajak Daerah.

- Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1.6 Pengurus Barang

- Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang Pengelola pada SKPKD.
- Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang Pengguna pada SKPD.
- Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu maksimal 2 orang Pembantu Pengurus Barang, menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah aset yang dikelola. (Nilai aset di atas 500 milyar Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu 2 orang Pembantu Pengurus Barang)
- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Pengurus Barang Pengguna.
- Pada UPTD (Puskesmas, SMPN dan Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan) ditunjuk 1 orang Pengurus Barang Pembantu.

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Barang/ Jasa, sebagaimana tercantum pada angka 1.1 dilekatkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan PPTK diberikan selama pelaksanaan kegiatan, diberikan maksimal 12 bulan.

Dalam hal terdapat penunjukan pejabat untuk menggantikan pejabat lainnya, pejabat pengganti dapat menerima honorarium pengelola keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pejabat Eselon III (Administrator) yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) **pada SKPD yang sama**, Pejabat dimaksud melaksanakan tugas dan diberikan honorarium **sebagai Pengguna Anggaran**. Pengelolaan Anggaran pada Bidang yang ditangani Pejabat tersebut tidak dilimpahkan kepada KPA.
- Pejabat Eselon III (Administrator) atau Eselon II yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) **pada SKPD yang berbeda**, Pejabat tersebut diberikan honorarium sebagai

Pengguna Anggaran pada jabatan Plt/Plh dan tetap diberikan honorarium pengelola keuangan pada jabatan definitifnya (PA atau KPA).

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (Satu) tahun anggaran paling banyak 10% (*Sepuluh Persen*) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4 Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah/lintas instansi di luar Pemkab, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan | Klasifikasi | | |
|----|--|-------------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pejabat Eselon III | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Pejabat di luar Instansi Pemkab | 5 | 6 | 7 |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat

untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
 - b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%(seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
 - c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
 - d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.
- 1.8. Honorarium Rohaniawan
Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
- 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari per review sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
 - 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisipwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal teskompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagaiberikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul

pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---|--------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.1. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | |
| | 1.1.1 PA merangkap BUD pada SKPKD | | |
| | Nilai Pagu di atas 250 miliar | OB | Rp. 6.348.000 |
| | 1.1.2 Kuasa BUD pada SKPKD | | |
| | Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar | OB | Rp. 5.951.000 |
| | 1.1.3 Pejabat Pengguna Anggaran (PA) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp. 1.170.000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta | OB | Rp. 1.406.000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta | OB | Rp. 1.631.000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 | OB | Rp. 1.867.000 |

| | | | |
|--|--|----|---------------|
| | miliar | | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OB | Rp. 2.216.000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | OB | Rp. 2.565.000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | OB | Rp. 2.913.000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OB | Rp. 3.386.000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OB | Rp. 3.847.000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d 75 miliar | OB | Rp. 4.320.000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar | OB | Rp. 4.781.000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar | OB | Rp. 5.366.000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar | OB | Rp. 5.951.000 |
| | 1.1.4. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp. 780.000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta | OB | Rp. 937.000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta | OB | Rp. 1.087.000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar | OB | Rp. 1.245.000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OB | Rp. 1.477.000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | OB | Rp. 1.710.000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | OB | Rp. 1.942.000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OB | Rp. 2.257.000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OB | Rp. 2.565.000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 75 miliar | OB | Rp. 2.880.000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar | OB | Rp. 3.187.000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar | OB | Rp. 3.577.000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar | OB | Rp. 3.967.000 |
| | | | |
| | 1.1.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp. 757.000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta | OB | Rp. 907.000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta | OB | Rp. 1.057.000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar | OB | Rp. 1.207.000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 | OB | Rp. 1.432.000 |

| | | | |
|--|--|----|---------------|
| | miliar | | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | OB | Rp. 1.657.000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | OB | Rp. 1.890.000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OB | Rp. 2.190.000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OB | Rp. 2.490.000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp. 75 miliar | OB | Rp. 2.790.000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar | OB | Rp. 3.097.000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar | OB | Rp. 3.472.000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar | OB | Rp. 3.847.000 |
| | 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta | OB | Rp. 400.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta | OB | Rp. 480.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | Rp. 570.000 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar | OB | Rp. 660.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar | OB | Rp. 770.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar | OB | Rp. 880.000 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar | OB | Rp. 990.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar | OB | Rp. 1.250.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar | OB | Rp. 1.520.000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar | OB | Rp. 1.780.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar | OB | Rp. 2.040.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 | OB | Rp. 2.440.000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar | OB | Rp. 2.830.000 |
| | 1.1.7 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta | OB | Rp. 300.000 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta | OB | Rp. 360.000 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta | OB | Rp. 427.000 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar | OB | Rp. 495.000 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar | OB | Rp. 577.000 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 | OB | Rp. 660.000 |

| | | | |
|--|--|----|---------------|
| | miliar | | |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar | OB | Rp. 742.000 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar | OB | Rp. 937.000 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar | OB | Rp. 1.140.000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar | OB | Rp. 1.335.000 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar | OB | Rp. 1.530.000 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 | OB | Rp. 1.830.000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar | OB | Rp. 2.122.000 |
| | 1.1.8 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara PPKD | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp. 340.000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta | OB | Rp. 420.000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta | OB | Rp. 500.000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar | OB | Rp. 570.000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OB | Rp. 670.000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | OB | Rp. 770.000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | OB | Rp. 860.000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OB | Rp. 1.090.000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OB | Rp. 1.320.000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar | OB | Rp. 1.550.000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar | OB | Rp. 1.780.000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar | OB | Rp. 2.120.000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar | OB | Rp. 2.470.000 |
| | 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp. 260.000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta | OB | Rp. 310.000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta | OB | Rp. 370.000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar | OB | Rp. 430.000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OB | Rp. 500.000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 | OB | Rp. 570.000 |

| | | | |
|--|---|----|---------------|
| | miliar | | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | OB | Rp. 640.000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OB | Rp. 810.000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OB | Rp. 980.000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar | OB | Rp. 1.150.000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar | OB | Rp. 1.330.000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar | OB | Rp. 1.580.000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar | OB | Rp. 1.840.000 |
| | 1.1.10 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pengelola) | | |
| | a. Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar | OB | Rp. 500.000 |
| | b. Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar | OB | Rp. 600.000 |
| | c. Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar | OB | Rp. 700.000 |
| | d. Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar | OB | Rp. 800.000 |
| | e. Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar | OB | Rp. 900.000 |
| | f. Nilai aset dikelola diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar | OB | Rp. 1.000.000 |
| | g. Nilai aset dikelola diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar | OB | Rp. 1.200.000 |
| | h. Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar | OB | Rp. 1.350.000 |
| | i. Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar | OB | Rp. 1.500.000 |
| | 1.1.11.Honorarium Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah | | |
| | a. Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar | OB | Rp. 350.000 |
| | b. Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar | OB | Rp. 400.000 |
| | c. Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar | OB | Rp. 500.000 |
| | d. Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar | OB | Rp. 600.000 |
| | e. Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar | OB | Rp. 700.000 |
| | f. Nilai aset dikelola diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar | OB | Rp. 800.000 |
| | g. Nilai aset dikelola diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar | OB | Rp. 900.000 |
| | h. Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar | OB | Rp. 1.100.000 |
| | i. Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar | OB | Rp. 1.300.000 |

| | | | |
|------|---|----|---------------|
| 1.2. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Untuk pengadaan 1 s/d 50 paket, jumlah pejabat pengadaan 1 orang 2. Untuk pengadaan 51 s/d 150 paket, jumlah pejabat pengadaan 2 orang 3. Untuk pengadaan 151 s/d 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 3 orang 4. Untuk pengadaan diatas 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 4 orang | | |
| | 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | OB | Rp. 400.000 |
| | 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa | | |
| | 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan Sampai dengan Rp 200 juta | OP | Rp. 510.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta | OP | Rp. 637.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar | OP | Rp. 765.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d 2.5 miliar | OP | Rp. 952.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d 5 miliar | OP | Rp. 1.140.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar | OP | Rp. 1.335.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar | OP | Rp. 1.590.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar | OP | Rp. 1.837.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar | OP | Rp. 2.092.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar | OP | Rp. 2.347.000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar | OP | Rp. 2.685.000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar | OP | Rp. 3.022.000 |
| | 1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan Sampai dengan Rp.200 juta | OP | Rp. 570.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta | OP | Rp. 570.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar | OP | Rp. 690.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d 2.5 miliar | OP | Rp. 855.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d 5 miliar | OP | Rp. 1.027.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar | OP | Rp. 1.200.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar | OP | Rp. 1.432.000 |

| | | | |
|------|--|----|---------------|
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar | OP | Rp. 1.657.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar | OP | Rp. 1.890.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar | OP | Rp. 2.115.000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar | OP | Rp. 2.422.000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar | OP | Rp. 2.730.000 |
| | 1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 50 juta | OP | Rp. 337.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta | OP | Rp. 337.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya sampai dengan Rp 100 juta | OP | Rp. 337.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | OP | Rp. 360.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | OP | Rp. 450.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | Rp. 540.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | Rp. 682.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | Rp. 817.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | Rp. 952.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | Rp. 1.132.000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | Rp. 1.312.000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | Rp. 1.492.000 |
| | m. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | Rp. 1.672.000 |
| | n. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | Rp. 1.920.000 |
| | o. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 miliar | OP | Rp. 2.160.000 |
| 1.3. | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA | | |
| | 1.3.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tim Pansel seleksi JPT | | |
| | a. Menteri Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya | OJ | Rp. 1.700.000 |
| | b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ | Rp. 1.400.000 |
| | c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan | OJ | Rp. 1.200.000 |
| | d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan | OJ | Rp. 1.000.000 |

| | | | |
|------|--|----------|---------------|
| | e. Pejabat Eselon III/yang disetarakan | OJ | Rp. 900.000 |
| | f. Pejabat Eselon IV kebawah/yang disetarakan | OJ | Rp. 750.000 |
| | 1.3.2 Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara | | |
| | a. Pejabat Eselon II | OJ | Rp. 500.000 |
| | b. Pejabat Eselon III | OJ | Rp. 450.000 |
| | c. Pejabat Eselon IV | OJ | Rp. 375.000 |
| | 1.3.3 Honorarium Moderator | Org/kali | Rp. 400.000 |
| | 1.3.4 Honorarium Pembawa Acara | Org/kali | Rp. 250.000 |
| 1.4. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | 1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 1.4.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp. 1.500.000 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp. 1.250.000 |
| | c. Ketua | OB | Rp. 1.000.000 |
| | d. Wakil Ketua | OB | Rp. 850.000 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp. 750.000 |
| | f. Anggota | OB | Rp. 750.000 |
| | 1.4.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp. 750.000 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp. 700.000 |
| | c. Ketua | OB | Rp. 650.000 |
| | d. Wakil Ketua | OB | Rp. 600.000 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp. 500.000 |
| | f. Anggota | OB | Rp. 500.000 |
| | 1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 1.4.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. Ketua/Wakil Ketua | OB | Rp. 250.000 |
| | b. Anggota | OB | Rp. 200.000 |
| 1.5. | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / DAN BERACARA | | |
| | 1.5.1 Honorarium Pemberi keterangan Ahli / saksi ahli | Org/kali | Rp. 1.500.000 |
| | 1.5.2 Honorarium Beracara | Org/kali | Rp. 1.500.000 |
| 1.6. | PENYULUH/PENDAMPING NON PNS | | |
| | 1.6.1 SLTA | OB | Rp. 1.800.000 |
| | 1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan | OB | Rp. 2.000.000 |
| | 1.6.3 Sarjana (S1) | OB | Rp. 2.200.000 |
| | 1.6.4 Master (S2) | OB | Rp. 2.350.000 |
| | 1.6.5 Doktor (S3) | OB | Rp. 2.700.000 |
| 1.7. | HONORARIUM ROHANIAWAN | | |
| | 1.7.1 Honorarium Rohaniawan Pengambil Sumpah Jabatan | OK | Rp. 400.000 |
| | 1.7.2 Honorarium Pembaca Doa | OK | Rp. 200.000 |
| 1.8. | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JULNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE | | |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penanggung jawab) | Oter | Rp. 300.000 |

| | | | |
|-------|---|----------------------|-------------|
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Redaktur) | Oter | Rp. 275.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penyunting/Editor) | Oter | Rp. 250.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Design Grafis) | Oter | Rp. 150.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Fotografer) | Oter | Rp. 150.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Sekretariat) | Oter | Rp. 100.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Pembuat Artikel) | Per Halaman | Rp. 100.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Penanggung Jwb) | Oter | Rp. 300.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Redaktur) | Oter | Rp. 275.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Editor) | Oter | Rp. 250.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Design grafis) | Oter | Rp. 150.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Fotografer) | Oter | Rp. 150.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Sekretariat) | Oter | Rp. 100.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Pembuat artikel) | Per Halaman | Rp. 100.000 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Penanggung Jawab) | OB | Rp. 500.000 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Redaktur) | OB | Rp. 450.000 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Editor) | OB | Rp. 400.000 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Admin) | OB | Rp. 350.000 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Developer) | OB | Rp. 300.000 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Pembuat Artikel) | Per Halaman | Rp. 100.000 |
| 1.9. | HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN | | |
| | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | | |
| | Pengawas Ujian | OH | Rp. 240.000 |
| | Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp. 3.000 |
| | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp. 150.000 |
| | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah | | |
| | Pengawas Ujian | OH | Rp. 270.000 |
| | Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp. 4.000 |
| | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp. 190.000 |
| 1.10. | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN | | |
| | Honorarium Penyusunan Butir Soal | Per Butir | Rp. 100.000 |

| | | Soal | |
|-------|---|----------------|---------------|
| | Honorarium Telaah Butir Soal | | |
| | Telaah Materi Soal | Per Butir Soal | Rp. 45.000 |
| | Telaah Bahasa Soal | Per Butir Soal | Rp. 20.000 |
| 1.11. | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) | | |
| | Honorarium Penceramah | OJP | Rp. 1.000.000 |
| | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | Rp. 300.000 |
| | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | Rp. 200.000 |
| | Honorarium Penyusunan Modul Diklat | MODUL | Rp. 5.000.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Penanggung jawab) | OK | Rp. 450.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Ketua/Wk.Ketua) | OK | Rp. 400.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Sekretaris) | OK | Rp. 300.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Anggota) | OK | Rp. 300.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Penanggung jawab) | OK | Rp. 675.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Ketua/Wk.Ketua) | OK | Rp. 600.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Sekretaris) | OK | Rp. 450.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Anggota) | OK | Rp. 450.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Penanggung jawab) | OK | Rp. 900.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Ketua/Wk.Ketua) | OK | Rp. 800.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Sekretaris) | OK | Rp. 600.000 |
| | Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Anggota) | OK | Rp. 600.000 |
| 1.12. | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pembina) | OB | Rp. 3.500.000 |
| | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Ketua) | OB | Rp. 2.500.000 |
| | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Wakil Ketua) | OB | Rp. 2.000.000 |
| | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris) | OB | Rp. 1.500.000 |
| | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Anggota) | OB | Rp. 1.300.000 |
| | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |

| | | | |
|-------|---|----|---------------|
| | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (anggota) | OB | Rp. 600.000 |
| 1.13. | HONORARIUM PERENCANA/PENGAWAS TEKNIS KEGIATAN FISIK SKPD | | |
| | Pendamping Teknis Kegiatan Fisik SKPD | OB | Rp. 250.000 |
| | Petugas Perencanaan Teknis (Ketua) | OK | Rp. 500.000 |
| | Petugas Perencanaan Teknis (Anggota) | OK | Rp. 350.000 |
| | Petugas Pengawasan Teknis | OB | Rp. 250.000 |
| 1.14 | HONORARIUM TENAGA AHLI | | |
| | Saksi Ahli dari Profesional/Bersertifikat | OK | Rp.10.000.000 |
| | Honorarium TP2D | OB | Rp. 5.500.000 |

Untuk Honorarium Moderator, Pembawa acara dan Pembaca Do'a dapat diberikan pada acara yang pembahasannya melibatkan Bapak Bupati/Wakil Bupati atau pejabat dari luar kabupaten Sampang.

Untuk honorarium Non ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian/kontrak kerja dengan Kepala SKPD dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Upah Minimum Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain' Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (deta sering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

1. Uang harian;
2. Uang Representasi; dan
3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain **dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam**. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Bupati), Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Wakil Bupati) dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten (Istri Sekda) disetarakan dengan Eselon II tanpa uang representasi.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian Bimtek hanya diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek sedangkan uang harian keberangkatan dan kepulangan dari Bimtek diberikan uang harian luar kota

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.2

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN MENGIKUTI DIKLAT/BIMTEK

| NO | PROVINSI/TUJUAN | SATUAN | LUAR KOTA | DIKLAT |
|-----|------------------|--------|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ACEH | OH | Rp 360.000 | Rp 110.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 3 | RIAU | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 5 | JAMBI | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |

| | | | | |
|----|---------------------|----|-------------|------------|
| 8 | LAMPUNG | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 9 | BENGKULU | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | Rp 410.000 | Rp 120.000 |
| 11 | BANTEN | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 13 | DKI JAKARTA | OH | Rp 530.000 | Rp 160.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | OH | Rp 420.000 | Rp 130.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | Rp 410.000 | Rp 120.000 |
| 17 | BALI | OH | Rp 480.000 | Rp 140.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | Rp. 440.000 | Rp 130.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 20 | KALIMATAN BARAT | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | Rp 360.000 | Rp 110.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | Rp 430.000 | Rp 110.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 26 | GORONTALO | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | Rp 410.000 | Rp 120.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | Rp 370.000 | Rp 110.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 31 | MALUKU | OH | Rp 380.000 | Rp 110.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | Rp 430.000 | Rp 130.000 |
| 33 | PAPUA | OH | Rp 580.000 | Rp 170.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | Rp 480.000 | Rp 140.000 |

Uang harian dalam kota yang lebih dari 8 jam diberikan sebesar Rp.160.000,-

- *) Uang harian masyarakat ke luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang dan dianggarkan di dalam DPA SKPD diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.275.000, sedangkan uang harian dalam rangka Diklat ke luar kota diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.75.000,00**

2. Uang Harian Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci sebagai berikut :

Tabel 1.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM) |
|-----|--------------------------------|--------|------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH | Rp 250.000 | Rp 125.000 |
| 2 | PEJABAT ESELON II | OH | Rp 150.000 | Rp 75.000 |

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.4
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | | | | GOLONGAN I/II |
|-----|------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | KEPALA DAERAH/KE TUA DPRD | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/GOL IV | PEJABAT ESELON IV/GOL III | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | ACEH | OH | Rp 4.420.000 | Rp 3.526.000 | Rp 1.294.000 | Rp 556.000 | Rp 556.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | Rp 4.960.000 | Rp 1.518.000 | Rp 1.100.000 | Rp 530.000 | Rp 530.000 |
| 3 | RIAU | OH | Rp 3.820.000 | Rp 3.119.000 | Rp 1.650.000 | Rp 852.000 | Rp 852.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | Rp 4.275.000 | Rp 1.854.000 | Rp 1.037.000 | Rp 792.000 | Rp 792.000 |
| 5 | JAMBI | OH | Rp 4.000.000 | Rp 3.337.000 | Rp 1.212.000 | Rp 580.000 | Rp 580.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | Rp 5.236.000 | Rp 3.332.000 | Rp 1.353.000 | Rp 650.000 | Rp 650.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | Rp 5.850.000 | Rp 3.083.000 | Rp 1.571.000 | Rp 861.000 | Rp 861.000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | Rp 4.491.000 | Rp 2.067.000 | Rp 1.140.000 | Rp 580.000 | Rp 580.000 |
| 9 | BENGKULU | OH | Rp 2.071.000 | Rp 1.628.000 | Rp 1.546.000 | Rp 630.000 | Rp 630.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | Rp. 3.827.000 | Rp 2.838.000 | Rp 1.957.000 | Rp 622.000 | Rp 622.000 |
| 11 | BANTEN | OH | Rp 5.725.000 | Rp 2.373.000 | Rp 1.000.000 | Rp 718.000 | Rp 718.000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | Rp 5.381.000 | Rp 2.755.000 | Rp 1.006.000 | Rp 570.000 | Rp 570.000 |
| 13 | DKI JAKARTA | OH | Rp 5.850.000 | Rp 1.490.000 | Rp 992.000 | Rp 730.000 | Rp 730.000 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | | | | |
|-----|---------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | KEPALA DAERAH/KE TUA DPRD | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/GOL IV | PEJABAT ESELON IV/GOL III | GOLONGAN I/II |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | Rp 4.242.000 | Rp 1.480.000 | Rp 954.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | OH | Rp 5.017.000 | Rp 2.695.000 | Rp 1.384.000 | Rp 845.000 | Rp 845.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | Rp 4.400.000 | Rp 1.605.000 | Rp 1.076.000 | Rp 664.000 | Rp 664.000 |
| 17 | BALI | OH | Rp 4.890.000 | Rp 1.946.000 | Rp 990.000 | Rp 910.000 | Rp 910.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | Rp 3.500.000 | Rp. 2.648.000 | Rp 1.418.000 | Rp 580.000 | Rp 580.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | Rp 3.000.000 | Rp 1.493.000 | Rp 1.355.000 | Rp 550.00 | Rp 550.00 |
| 20 | KALIMATAN BARAT | OH | Rp 2.654.000 | Rp 1.538.000 | Rp 1.125.000 | Rp 538.000 | Rp 538.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | Rp 4.901.000 | Rp 3.391.000 | Rp 1.160.000 | Rp 659.000 | Rp 659.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp 4.797.000 | Rp 3.316.000 | Rp 1.500.000 | Rp 540.000 | Rp 540.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | Rp 4.000.000 | Rp 2.188.000 | Rp 1.507.000 | Rp 804.000 | Rp 804.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | Rp 4.000.000 | Rp 2.188.000 | Rp 1.507.000 | Rp 804.000 | Rp 804.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | Rp 4.919.000 | Rp 2.290.000 | Rp 924.000 | Rp 782.000 | Rp 782.000 |
| 26 | GORONTALO | OH | Rp 4.168.000 | Rp 2.549.000 | Rp 1.431.000 | Rp 764.000 | Rp 764.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | Rp 4.076.000 | Rp 2.581.000 | Rp 1.075.000 | Rp 704.000 | Rp 704.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | Rp 4.820.000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.020.000 | Rp 732.000 | Rp 732.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | Rp 2.309.000 | Rp 2.027.000 | Rp 1.567.000 | Rp 951.000 | Rp 951.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | Rp 2.475.000 | Rp 2.059.000 | Rp 1.297.000 | Rp 786.000 | Rp 786.000 |
| 31 | MALUKU | OH | Rp 3.467.000 | Rp 3.240.000 | Rp 1.048.000 | Rp 667.000 | Rp 667.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | Rp 3.440.000 | Rp 3.175.000 | Rp 1.073.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| 33 | PAPUA | OH | Rp 3.859.000 | Rp 3.318.000 | Rp 2.521.000 | Rp 829.000 | Rp 829.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | Rp 3.872.000 | Rp 3.212.000 | Rp 2.056.000 | Rp 718.000 | Rp 718.000 |

Untuk Biaya penginapan masyarakat yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang disetarakan dengan gol II

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Penganggaran satuan biaya paket kegiatan rapat dianggarkan pada kode rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan/atau belanja sewa hotel

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang, dengan satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor mengacu pada Tabel 1.6

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip

pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut :

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

| NO. | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|-----|---------------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | ACEH | OP | Rp 346.000,00 | Rp 403.000,00 | Rp 1.075.000,00 | Rp 749.000,00 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OP | Rp 276.000,00 | Rp 365.000,00 | Rp 800.000,00 | Rp 641.000,00 |
| 3 | RIAU | OP | Rp 225.000,00 | Rp 335.000,00 | Rp 690.000,00 | Rp 560.000,00 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OP | Rp 230.000,00 | Rp 360.000,00 | Rp 790.000,00 | RP 590.000,00 |
| 5 | JAMBI | OP | Rp 271.000,00 | Rp 364.000,00 | Rp 1.008.000,00 | Rp 635.000,00 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OP | Rp 245.000,00 | Rp 310.000,00 | Rp 987.000,00 | Rp 555.000,00 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OP | Rp 268.000,00 | Rp 384.000,00 | Rp 860.000,00 | Rp 652.000,00 |
| 8 | LAMPUNG | OP | Rp 261.000,00 | Rp 373.000,00 | Rp 836.000,00 | Rp 634.000,00 |
| 9 | BENGGULU | OP | Rp 250.000,00 | Rp 373.000000 | Rp 973.000000 | Rp 623.000,00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OP | Rp 305.000,00 | Rp 400.000,00 | Rp 925.000,00 | Rp 705.000,00 |
| 11. | BANTEN | OP | Rp 395.000,00 | Rp 468.000,00 | Rp 919.000,00 | Rp 863.000,00 |
| 12 | JAWA BARAT | OP | Rp 426.000,00 | Rp 530.000,00 | Rp 1.110.000,00 | Rp 956.000,00 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA | OP | Rp 433.000,00 | Rp 510.000,00 | Rp 1.216.000,00 | Rp 943.000,00 |
| 14 | JAWA TENGAH | OP | Rp 232.000,00 | Rp 309.000,00 | Rp 749.000,00 | Rp 541.000,00 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | OP | Rp 250.000,00 | Rp 405.000,00 | Rp 963.000,00 | Rp 655.000,00 |
| 16 | JAWA TIMUR | OP | Rp 357.000,00 | Rp 406.000,00 | Rp 1.784.000,00 | Rp 763.000,00 |
| 17 | BALI | OP | Rp 375.000,00 | Rp 490.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 865.000,00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OP | Rp 368.000,00 | Rp 530.000,00 | Rp 1.001.000,00 | Rp 898.000,00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OP | Rp 308.000,00 | Rp 388.000,00 | Rp 1.088.000000 | Rp 696.000,00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OP | Rp 337.000,00 | Rp 400.000,00 | Rp 810.000,00 | Rp 737.000,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|----|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 21 | KALI MANTAN TENGAH | OP | Rp 317.000,00 | Rp 487.000,00 | Rp 1.260.000,00 | Rp 804.000,00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OP | Rp 264.000,00 | Rp 360.000,00 | Rp 930.000,00 | Rp 624.000,00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OP | Rp 274.000,00 | Rp 365.000,00 | Rp 863.000,00 | Rp 639.000,00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OP | Rp 274.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 848.000,00 | Rp 624.000,00 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OP | Rp 273.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 870.000,00 | Rp 623.000,00 |
| 26 | GORONTALO | OP | Rp 215.000,00 | Rp 393.000,00 | Rp 1.338.000,00 | Rp 608.000,00 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OP | Rp 264.000,00 | Rp 382.000,00 | Rp 856.000, 00 | Rp 646.000,00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OP | RP 290.000,00 | RP 410.000,00 | RP 1.574.000,00 | Rp 700.000,00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OP | Rp 283.000,00 | Rp 389.000,00 | Rp 1.013.000,00 | Rp 672.000,00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OP | Rp 237.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 800.000,00 | Rp 587.000,00 |
| 31 | MALUKU | OP | Rp 306.000,00 | Rp 454.000,00 | Rp 1.300.000,00 | Rp 760.000,00 |
| 32 | MALUKU UTARA | OP | Rp 316.000,00 | Rp 498.000,00 | Rp 850.000,00 | Rp 814.000,00 |
| 33 | PAPUA | OP | Rp 318.000,00 | Rp 536.000,00 | Rp 1.863.000,00 | Rp 854 000,00 |
| 34 | PAPUA BARAT | OP | Rp 292.000,00 | Rp 526.000,00 | Rp 1.752.000,00 | Rp 818.000,00 |

Tabel 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

| NO. | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|-----|---------------------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | ACEH | OP | Rp 300.000,00 | Rp 330.000,00 | Rp 772.000,00 | Rp 630.000, 00 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OP | Rp 178.000,00 | Rp 275.000,00 | Rp 746.000,00 | Rp 453.000,00 |
| 3 | RIAU | OP | Rp 185.000,00 | Rp 245.000,00 | Rp 591.000,00 | Rp 430.000,00 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OP | Rp 227.000,00 | Rp 273.000,00 | Rp 625.000,00 | Rp 500.000,00 |
| 5 | JAMBI | OP | Rp 215.000,00 | Rp 301.000,00 | Rp 840.000,00 | Rp 516.000,00 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OP | Rp 173.000,00 | Rp 240.000,00 | Rp 663.000,00 | Rp 413.000,00 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OP | Rp 218.000,00 | Rp 293.000,00 | Rp 745.000,00 | Rp 511.000,00 |
| 8 | LAMPUNG | OP | Rp 216.000,00 | Rp 270.000,00 | Rp 640.000,00 | Rp 486.000,00 |
| 9 | BENGGULU | OP | Rp | Rp | Rp | Rp |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | 214.000,00 | 284.000,00 | 912.000,00 | 498.000,00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OP | Rp 299.000,00 | Rp 385.000,00 | Rp 804.000,00 | Rp 684.000,00 |
| 11 | BANTEN | OP | Rp 275.000,00 | Rp 354.000,00 | Rp 837.000,00 | Rp 629.000,00 |
| 12 | JAWA BARAT | OP | Rp 331 .000,00 | Rp 398.000,00 | Rp 822.000,00 | Rp 729.000,00 |
| 13 | D.K. I. JAKARTA | OP | Rp 354.000,00 | Rp 433.000,00 | Rp 1.197.000,00 | Rp 787.000,00 |
| 14 | JAWA TENGAH | OP | Rp 191.000,00 | Rp 263.000,00 | Rp 675.000,00 | Rp 454.000,00 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | OP | Rp 210.000,00 | Rp 310.000,00 | Rp 750.000,00 | Rp 520.000,00 |
| 16 | JAWA TIMUR | OP | Rp 338.000,00 | Rp 395.000,00 | Rp 1.352.000,00 | Rp 733.000,00 |
| 17 | BALI | OP | Rp 330.000,00 | Rp 441.000,00 | Rp 1.182.000,00 | Rp 771.000,00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OP | Rp 280.000,00 | Rp 420.000,00 | Rp 764.000,00 | Rp 700.000,00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OP | Rp 271.000,00 | Rp 377.000,00 | Rp 825.000,00 | Rp 648.000,00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OP | Rp 250.000,00 | Rp 331.000,00 | Rp 664.000,00 | Rp 581.000,00 |
| 21 | KALI MANTAN TENGAH | OP | Rp 242.000,00 | Rp 340.000,00 | Rp 1.031.000,00 | Rp 582.000,00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OP | Rp 194.000, 00 | Rp 295.000,00 | Rp 734.000, 00 | Rp 489.000,00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OP | Rp 207.000,00 | Rp 302.000,00 | Rp 750.000,00 | Rp 509.000,00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OP | Rp 207.000,00 | Rp 302.000,00 | Rp 750.000,00 | Rp 509.000,00 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OP | Rp 185.000,00 | Rp 270.000,00 | Rp 737.000, 00 | Rp 455.000,00 |
| 26 | GORONTALO | OP | Rp 175.000,00 | Rp 250.000,00 | Rp 1.299.000,00 | Rp 425.000,00 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OP | Rp 235.000, 00 | Rp 323.000,00 | Rp 792.000, 00 | Rp 558.000,00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OP | Rp 206.000,00 | Rp 320.000,00 | Rp 1.127.000,00 | Rp 526.000,00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OP | Rp 234.000,00 | Rp 385.000,00 | Rp 738.000,00 | Rp 619.000,00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OP | Rp 195.000,00 | Rp 295.000,00 | Rp 688.000,00 | Rp 490.000,00 |
| 31 | MALUKU | OP | Rp 253.000,00 | Rp 346.000,00 | Rp 724.000,00 | Rp 599.000,00 |
| 32 | MALUKU UTARA | OP | Rp 169.000,00 | Rp 354.000,00 | Rp 669.000,00 | Rp 523.000,00 |
| 33 | PAPUA | OP | Rp 293.000,00 | Rp 478.000,00 | Rp 990.000,00 | Rp 771.000,00 |
| 34 | PAPUA BARAT | OP | Rp 284.000, 00 | Rp 421.000,00 | Rp 1.120.000,00 | Rp 705.000,00 |

- 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci sebagai berikut :

Tabel 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

| NO | PROVINSI | SATUAN | Fullboard di Luar Kota | Fullboard di Dalam Kota | Fullday/Half di dalam Kota | RESIDENCE Dalam Kota |
|-----|----------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | JAWA TIMUR | OP | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 100.000 | Rp 140.000 |
| 2 | D.I YOGYAKARTA | OP | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 100.000 | Rp 140.000 |

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------------------|--------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | PEJABAT ESELON I/PEJABAT NEGARA | Unit | Rp702.970.000 |
| 2 | PEJABAT ESELON II | Unit | Rp 472.468.000 |

Tabel 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

| NO | URAIAN | SATUAN | PICK UP | MINIBUS | DOUBLE GARDAN |
|-----|-----------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | KENDARAAN OPERASIONAL | Unit | Rp. 212.608.000 | Rp 313.761.000 | Rp 468.830.000 |

Tabel 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|----------------------------|--------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Roda 4 dan/atau Bus Kecil | Unit | Rp 360.942.000 |
| 2 | Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit | Rp 718.252.000 |
| 3 | Roda 6 dan/atau Bus Besar | Unit | Rp 1.184.787.000 |

Tabel 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2
(DUA) DAN RODA 3 (TIGA)

| NO | URAIAN | SATUAN | OPERASIONAL | LAPANGAN |
|-----|------------------|--------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | KENDARAAN RODA 2 | Unit | Rp 30.767.000 | Rp 38.702.000 |
| 2 | KENDARAAN RODA 3 | Unit | - | Rp 41.880.000 |

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 98 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
 TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
 TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Konsumsi; dan
4. Satuan Biaya Pemeliharaan;

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|--|--------|---------------|
| 1.1. | Honorarium Narasumber | OJ | Rp 1.700.000 |
| 1.2. | Honorarium Moderator | OK | Rp 1.000.000 |
| 1.3. | Honorarium Pembawa Acara | OK | Rp 750.000 |
| 1.4 | Honorarium Penceramah Agama Tingkat Nasional (termasuk transport dan akomodasi) | OK | Rp.20.000.000 |
| 1.5 | Honorarium Penceramah Agama Tingkat Propinsi (termasuk transport dan akomodasi) | OK | Rp.10.000.000 |
| 1.5 | Honorarium Penceramah Agama Tingkat Kabupaten (termasuk transport dan akomodasi) | OK | Rp. 3.000.000 |

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|----------|----------------|--------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | SURABAYA | JAKARTA | Rp 5.466.000 | Rp 2.674.000 |
| 2 | SURABAYA | AMBON | Rp 8.803.000 | Rp 4.845.000 |
| 3 | SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp 10.889.000 | Rp 5.113.000 |
| 4 | SURABAYA | BANDA ACEH | Rp 10.985.000 | Rp 5.744.000 |
| 5 | SURABAYA | BANDAR LAMPUNG | Rp 6.386.000 | Rp 3.123.000 |
| 6 | SURABAYA | BANDUNG | Rp 4.824.000 | Rp 2.856.000 |
| 7 | SURABAYA | BANJARMASIN | Rp 8.942.000 | Rp 4.385.000 |
| 8 | SURABAYA | BATAM | Rp 8.600.000 | Rp 4.300.000 |
| 9 | SURABAYA | BIAK | Rp 12.782.000 | Rp 7.081.000 |
| 10 | SURABAYA | DENPASAR | RP 3.198.000 | Rp 1.979.000 |
| 11 | SURABAYA | JAMBI | Rp 7.883.000 | Rp 3.915.000 |
| 12 | SURABAYA | JAYAPURA | Rp 12.675.000 | Rp 7.231.000 |
| 13 | SURABAYA | KENDARI | Rp 11.103.000 | Rp 5.466.000 |
| 14 | SURABAYA | KUPANG | Rp 6.749.000 | Rp 5.466.000 |
| 15 | SURABAYA | MAKASSAR | Rp 5.936.000 | Rp 3.433.000 |
| 16 | SURABAYA | MANADO | RP 9.937.000 | Rp 5.262.000 |
| 17 | SURABAYA | MATARAM | Rp 3.829.000 | Rp 2.321.000 |
| 18 | SURABAYA | MEDAN | Rp 10.793.000 | Rp 5.134.000 |
| 19 | SURABAYA | PADANG | RP 9.199.000 | Rp 4.364.000 |
| 20 | SURABAYA | PALANGKARAYA | Rp 8.696.000 | Rp 4.385.000 |
| 21 | SURABAYA | PALEMBANG | Rp 7.690.000 | Rp 3.744.000 |
| 22 | SURABAYA | PALU | Rp 6.878.000 | Rp 3.883.000 |
| 23 | SURABAYA | PANGKAL PINANG | Rp 7.284.000 | Rp 3.626.000 |
| 24 | SURABAYA | PEKAN BARU | Rp 9.241.000 | Rp 4.407.000 |
| 25 | SURABAYA | PONTIANAK | Rp 8.140.000 | Rp 4.204.000 |
| 26 | SURABAYA | TIMIKA | Rp 11.295.000 | Rp 6.589.000 |
| 27 | SURABAYA | DI. JOGYAKARTA | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |

Keterangan : tiket bisnis hanya diperuntukkan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

Untuk efisiensi dan penghematan, perjalanan dinas dari kabupaten Sampang ke luar propinsi, biaya taksi hanya digunakan untuk :

- 1) Perjalanan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
- 2) Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kepulangan

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | ACEH | Orang/Kali | Rp 123.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | Orang/Kali | Rp 232.000 |
| 3 | RIAU | Orang/Kali | Rp 94.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | Orang/Kali | Rp 137.000 |
| 5 | JAMBI | Orang/Kali | Rp 147.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | Orang/Kali | Rp 190.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | Orang/Kali | Rp 128.000 |
| 8 | LAMPUNG | Orang/Kali | Rp 167.000 |
| 9 | BENGKULU | Orang/Kali | Rp 109.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | Orang/Kali | Rp 90.000 |
| 11 | BANTEN | Orang/Kali | Rp 446.000 |
| 12 | JAWA BARAT | Orang/Kali | Rp 166.000 |
| 13 | DKI JAKARTA | Orang/Kali | Rp 256.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | Orang/Kali | Rp 75.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | Orang/Kali | Rp 118.000 |
| 17 | BALI | Orang/Kali | Rp 159.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | Rp 231.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | Rp 108.000 |
| 20 | KALIMATAN BARAT | Orang/Kali | Rp 135.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | Orang/Kali | Rp 111.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | Orang/Kali | Rp 150.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | Orang/Kali | Rp 450.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | Orang/Kali | Rp 102.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | Orang/Kali | Rp 138.000 |
| 26 | GORONTALO | Orang/Kali | Rp 240.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | Orang/Kali | Rp 313.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | Orang/Kali | Rp 145.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | Orang/Kali | Rp 165.000 |

| | | | |
|----|-------------------|------------|------------|
| 30 | SULAWESI TENGGARA | Orang/Kali | Rp 171.000 |
| 31 | MALUKU | Orang/Kali | Rp 240.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | Orang/Kali | Rp 215.000 |
| 33 | PAPUA | Orang/Kali | Rp 431.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | Orang/Kali | Rp 182.000 |

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) DAN BIAYA RATA RATA BBM

- a) Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b) Satuan biaya transportasi darat juga digunakan dari tempat kedudukan ke bandara, terminal atau stasiun.
- c) Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi dibayarkan sebagaimana tercantum pada tabel 2.4
- d) Biaya Rata-Rata BBM :
 - 1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya BBM sebagai pengganti uang transportasi darat dengan standart 1 liter per 8 km
 - 2) Jarak tempuh rata-rata dari sampang ke kota-kota dalam lingkup wilayah Jawa Timur, tercantum dalam tabel
 - 3) Perjalanan dinas ke luar Propinsi Jawa Timur yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, diberikan biaya BBM sesuai jarak tempuh dengan standart 1 liter/8 km
 - 4) Tiket penyeberangan/jalan tol sesuai tarif dianggarkan/melekat pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah dan pembiayaannya secara (at cost)

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) dan BBM untuk Pulang Pergi (PP) terinci sebagai berikut :

Tabel 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

| NO | KABUPATEN | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | BESARAN |
|----|--------------|-----------------|----------|------------|
| 1 | Kab. Sampang | Kota. Surabaya | Org/Kali | Rp 235.000 |
| 2 | Kab. Sampang | Kab. Banyuwangi | Org/Kali | Rp 520.000 |
| 3 | Kab. Sampang | Kab. Blitar | Org/Kali | Rp 490.000 |
| 4 | Kab. Sampang | Kab. Bojonegoro | Org/Kali | Rp 460.000 |
| 5 | Kab. Sampang | Kab. Bondowoso | Org/Kali | Rp 490.000 |
| 6 | Kab. Sampang | Kab. Gresik | Org/Kali | Rp 460.000 |
| 7 | Kab. Sampang | Kab. Jember | Org/Kali | Rp 495.000 |
| 8 | Kab. Sampang | Kab. Jombang | Org/Kali | Rp 470.000 |
| 9 | Kab. Sampang | Kab. Kediri | Org/Kali | Rp 470.000 |

| | | | | |
|----|--------------|-------------------|----------|------------|
| 10 | Kab. Sampang | Kab. Lamongan | Org/Kali | Rp 460.000 |
| 11 | Kab. Sampang | Kab. Lumajang | Org/Kali | Rp 496.000 |
| 12 | Kab. Sampang | Kab. Madiun | Org/Kali | Rp 480.000 |
| 13 | Kab. Sampang | Kab. Magetan | Org/Kali | Rp 488.000 |
| 14 | Kab. Sampang | Kab. Malang | Org/Kali | Rp 463.000 |
| 15 | Kab. Sampang | Kab. Mojokerto | Org/Kali | Rp 460.000 |
| 16 | Kab. Sampang | Kab. Nganjuk | Org/Kali | Rp 480.000 |
| 17 | Kab. Sampang | Kab. Ngawi | Org/Kali | Rp 470.000 |
| 18 | Kab. Sampang | Kab. Pacitan | Org/Kali | Rp 520.000 |
| 19 | Kab. Sampang | Kab. Pasuruan | Org/Kali | Rp 463.000 |
| 20 | Kab. Sampang | Kab. Ponorogo | Org/Kali | Rp 490.000 |
| 21 | Kab. Sampang | Kab. Probolinggo | Org/Kali | Rp 463.000 |
| 22 | Kab. Sampang | Kab. Sidoarjo | Org/Kali | Rp 475.000 |
| 23 | Kab. Sampang | Kab. Situbondo | Org/Kali | Rp 490.000 |
| 24 | Kab. Sampang | Kab. Trenggalek | Org/Kali | Rp 480.000 |
| 25 | Kab. Sampang | Kab. Tuban | Org/Kali | Rp 480.000 |
| 26 | Kab. Sampang | Kab. Tulungagung | Org/Kali | Rp 480.000 |
| 27 | Kab. Sampang | Kota. Batu | Org/Kali | Rp 477.000 |
| 28 | Kab. Sampang | Kota. Blitar | Org/Kali | Rp 490.000 |
| 29 | Kab. Sampang | Kota. Bojonegoro | Org/Kali | Rp 460.000 |
| 30 | Kab. Sampang | Kota. Kediri | Org/Kali | Rp 470.000 |
| 31 | Kab. Sampang | Kota. Madiun | Org/Kali | Rp 480.000 |
| 32 | Kab. Sampang | Kota. Malang | Org/Kali | Rp 463.000 |
| 33 | Kab. Sampang | Kota. Mojokerto | Org/Kali | Rp 460.000 |
| 34 | Kab. Sampang | Kota. Probolinggo | Org/Kali | Rp 463.000 |
| 35 | Kab. Sampang | Kab. Bangkalan | Org/Kali | Rp 150.000 |
| 36 | Kab. Sampang | Kab. Pamekasan | Org/Kali | Rp 100.000 |
| 37 | Kab. Sampang | Kab. Sumenep | Org/Kali | Rp 150.000 |

Tabel 2.5

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
WILAYAH JAWA TIMUR UNTUK PULANG PERGI (PP)

| NO | TUJUAN | JARAK | BBM (PP) | NO | TUJUAN | JARAK | BBM (PP) |
|----|-----------------|--------|-----------|----|-------------------|--------|----------|
| 1 | Kota. Surabaya | 100 Km | 25 Liter | 20 | Kab. Ponorogo | 283 Km | 75 Liter |
| 2 | Kab. Banyuwangi | 378 Km | 100 Liter | 21 | Kab. Probolinggo | 189 Km | 50 Liter |
| 3 | Kab. Blitar | 260 Km | 65 Liter | 22 | Kab. Sidoarjo | 120 Km | 30 Liter |
| 4 | Kab. Bojonegoro | 198 Km | 50 Liter | 23 | Kab. Situbondo | 284 Km | 75 Liter |
| 5 | Kab. Bondowoso | 281 Km | 75 Liter | 24 | Kab. Trenggalek | 280 Km | 70 Liter |
| 6 | Kab. Gresik | 120 Km | 30 Liter | 25 | Kab. Tuban | 193 Km | 50 Liter |
| 7 | Kab. Jember | 287 Km | 75 Liter | 26 | Kab. Tulungagung | 260 Km | 65 Liter |
| 8 | Kab. Jombang | 170 Km | 45 Liter | 27 | Kota. Batu | 199 Km | 50 Liter |
| 9 | Kab. Kediri | 220 Km | 55 Liter | 28 | Kota. Blitar | 260 Km | 65 Liter |
| 10 | Kab. Lamongan | 135 Km | 35 Liter | 29 | Kota. Bojonegoro | 198 Km | 50 Liter |
| 11 | Kab. Lumajang | 235 Km | 60 Liter | 30 | Kota. Kediri | 220 Km | 55 Liter |
| 12 | Kab. Madiun | 259 Km | 65 Liter | 31 | Kota. Madiun | 259 Km | 65 Liter |
| 13 | Kab. Magetan | 383 Km | 100 Liter | 32 | Kota. Malang | 179 Km | 45 Liter |
| 14 | Kab. Malang | 179 Km | 45 Liter | 33 | Kota. Mojokerto | 140 Km | 35 Liter |
| 15 | Kab. Mojokerto | 140 Km | 35 Liter | 34 | Kota. Probolinggo | 189 Km | 50 Liter |
| 16 | Kab. Nganjuk | 220 Km | 55 Liter | 35 | Kab. Bangkalan | 72 Km | 20 Liter |
| 17 | Kab. Ngawi | 271 Km | 70 Liter | 36 | Kab. Pamekasan | 40 Km | 10 Liter |
| 18 | Kab. Pacitan | 380 Km | 95 Liter | 37 | Kab. Sumenep | 102 Km | 25 Liter |
| 19 | Kab. Pasuruan | 150 Km | 40 Liter | | | | |

Tabel 2.6
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
WILAYAH DALAM DAERAH KABUPATEN SAMPANG UNTUK PULANG PERGI

| NO | KABUPATEN | KECAMATAN | SATUAN | BBM |
|----|--------------|--------------------|--------|-----|
| 1 | Kab. Sampang | Kec. Sampang | Liter | 3 |
| 2 | Kab. Sampang | Kec. Torjun | Liter | 5 |
| 3 | Kab. Sampang | Kec. Camplong | Liter | 6 |
| 4 | Kab. Sampang | Kec. Pangarengan | Liter | 5 |
| 5 | Kab. Sampang | Kec. Omben | Liter | 7 |
| 6 | Kab. Sampang | Kec. Jrengik | Liter | 7 |
| 7 | Kab. Sampang | Kec. Kedungdung | Liter | 7 |
| 8 | Kab. Sampang | Kec. Robatal | Liter | 10 |
| 9 | Kab. Sampang | Kec. Tambelangan | Liter | 10 |
| 10 | Kab. Sampang | Kec. Karang Penang | Liter | 11 |
| 11 | Kab. Sampang | Kec. Ketapang | Liter | 13 |
| 12 | Kab. Sampang | Kec. Sreseh | Liter | 12 |
| 13 | Kab. Sampang | Kec. Banyuates | Liter | 16 |
| 14 | Kab. Sampang | Kec. Sokobanah | Liter | 15 |

2.4. SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

Satuan bantuan transport Non PNS digunakan untuk bantuan biaya transportasi (PP) Non PNS (Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama/ Kelompok Tani/ Nelayan/masyarakat lainnya) yang mengikuti Perjalanan Dinas ke luar kota di wilayah/di luar Propinsi Jawa Timur atas undangan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.

Bantuan transportasi luar kota non PNS dibayarkan secara *lumpsum*.

Rincian bantuan transportasi sebagai berikut :

Tabel 2.7
SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

| NO | KABUPATEN | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | Uang Transport (PP) lumpsum |
|----|--------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 1 | Kab. Sampang | Kota. Surabaya | Org/Kali | Rp 200.000 |
| 2 | Kab. Sampang | Kab. Banyuwangi | Org/Kali | Rp 500.000 |
| 3 | Kab. Sampang | Kab. Blitar | Org/Kali | Rp 300.000 |

| | | | | |
|----|--------------|-------------------|----------|------------|
| 4 | Kab. Sampang | Kab. Bojonegoro | Org/Kali | Rp 400.000 |
| 5 | Kab. Sampang | Kab. Bondowoso | Org/Kali | Rp 400.000 |
| 6 | Kab. Sampang | Kab. Gresik | Org/Kali | Rp 275.000 |
| 7 | Kab. Sampang | Kab. Jember | Org/Kali | Rp 400.000 |
| 8 | Kab. Sampang | Kab. Jombang | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 9 | Kab. Sampang | Kab. Kediri | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 10 | Kab. Sampang | Kab. Lamongan | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 11 | Kab. Sampang | Kab. Lumajang | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 12 | Kab. Sampang | Kab. Madiun | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 13 | Kab. Sampang | Kab. Magetan | Org/Kali | Rp 375.000 |
| 14 | Kab. Sampang | Kab. Malang | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 15 | Kab. Sampang | Kab. Mojokerto | Org/Kali | Rp 275.000 |
| 16 | Kab. Sampang | Kab. Nganjuk | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 17 | Kab. Sampang | Kab. Ngawi | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 18 | Kab. Sampang | Kab. Pacitan | Org/Kali | Rp 400.000 |
| 19 | Kab. Sampang | Kab. Pasuruan | Org/Kali | Rp 275.000 |
| 20 | Kab. Sampang | Kab. Ponorogo | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 21 | Kab. Sampang | Kab. Probolinggo | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 22 | Kab. Sampang | Kab. Sidoarjo | Org/Kali | Rp 275.000 |
| 23 | Kab. Sampang | Kab. Situbondo | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 24 | Kab. Sampang | Kab. Trenggalek | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 25 | Kab. Sampang | Kab. Tuban | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 26 | Kab. Sampang | Kab. Tulungagung | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 27 | Kab. Sampang | Kota. Batu | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 28 | Kab. Sampang | Kota. Blitar | Org/Kali | Rp 350.000 |
| 29 | Kab. Sampang | Kota. Bojonegoro | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 30 | Kab. Sampang | Kota. Kediri | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 31 | Kab. Sampang | Kota. Madiun | Org/Kali | Rp 325.000 |
| 32 | Kab. Sampang | Kota. Malang | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 33 | Kab. Sampang | Kota. Mojokerto | Org/Kali | Rp 275.000 |
| 34 | Kab. Sampang | Kota. Probolinggo | Org/Kali | Rp 300.000 |
| 35 | Kab. Sampang | Kab. Bangkalan | Org/Kali | Rp 150.000 |
| 36 | Kab. Sampang | Kab. Pamekasan | Org/Kali | Rp 100.000 |
| 37 | Kab. Sampang | Kab. Sumenep | Org/Kali | Rp 200.000 |

2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KABUPATEN SAMPANG

Satuan Uang transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten atau sebaliknya. **Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi Lokal.**

Satuan uang transportasi dalam daerah kabupaten Sampang dan dalam lingkup kecamatan di wilayah Kabupaten sampang, dibayarkan secara *lumpsum*.

Satuan Uang Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.8
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH
KABUPATEN SAMPANG

| NO | KABUPATEN | KECAMATAN | SATUAN | Transpotasi LOKAL (Kurang Dari 8 Jam) | BANTUAN TRANSPORT DAN UANG HARIAN NON PNS (<i>lumsump</i>) |
|----|--------------|--------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 1 | Kab. Sampang | Kec. Sampang | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.65.000 |
| 2 | Kab. Sampang | Kec. Torjun | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp 65.000 |
| 3 | Kab. Sampang | Kec. Camplong | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp 65.000 |
| 4 | Kab. Sampang | Kec. Pangarengan | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp 65.000 |
| 5 | Kab. Sampang | Kec. Omben | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.65.000 |
| 6 | Kab. Sampang | Kec. Jrengik | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.65.000 |
| 7 | Kab. Sampang | Kec. Kedungdung | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.65.000 |
| 8 | Kab. Sampang | Kec. Robatal | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.75.000 |
| 9 | Kab. Sampang | Kec. Tambelangan | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.75.000 |
| 10 | Kab. Sampang | Kec. Karang Penang | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.75.000 |
| 11 | Kab. Sampang | Kec. Ketapang | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.100.000 |
| 12 | Kab. Sampang | Kec. Sreseh | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.100.000 |
| 13 | Kab. Sampang | Kec. Banyuates | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.100.000 |
| 14 | Kab. Sampang | Kec. Sokobanah | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.100.000 |
| 15 | Kab. Sampang | Pulau Mandangin | Org/Kali | Rp 100.000 | Rp.100.000 |

Bantuan transportasi lokal Non PNS untuk kegiatan sosialisasi yang bertempat di kecamatan yang sama dapat diberikan sebesar Rp.50.000,00

2.6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Apabila tidak diperoleh bukti riil, dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran riil.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci sebagai berikut :

Tabel 2.9
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (<i>at cost</i>) |
|-----|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Jakarta | Kota Bekasi | Orang/Kali | Rp 284.000,00 |
| 2. | Jakarta | Kab. Bekasi | Orang/Kali | Rp 284.000,00 |
| 3. | Jakarta | Kab. Bogor | Orang/Kali | Rp 300.000,00 |
| 4. | Jakarta | Kota Bogor | Orang/Kali | Rp 300.000,00 |
| 5. | Jakarta | Kota Depok | Orang/Kali | Rp 275.000,00 |
| 6. | Jakarta | Kota Tangerang | Orang/Kali | Rp 286.000,00 |
| 7. | Jakarta | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | Rp 286.000,00 |
| 8. | Jakarta | Kab. Tangerang | Orang/Kali | Rp 310.000,00 |
| 9. | Jakarta | Kepulauan Seribu | Orang/Kali | Rp 428.000,00 |

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI

3.1 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II, III, IV, Staf, Non PNS dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

| NO | URAIAN | SATUAN | MAKAN | KUDAPAN/SNACK |
|-----|--|------------|------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (VIP) | Orang/Kali | Rp 110.000 | Rp 49.000 |
| 2 | Rapat > 2 jam | Orang/Kali | - | Rp 17.500 |
| 3 | Rapat ≥ 4 jam | Orang/Kali | Rp 30.000 | Rp 17.500 |

3.2 SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan termasuk minuman untuk Aktivitas Kegiatan Lapangan :

- a. Kegiatan Lapangan dalam penanganan Bencana Alam, kegiatan Sosial dan kegiatan Aktivitas lainnya
- b. Makan Minum Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
- c. Makan Minum Pasien Rumah Inap di Puskesmas
- d. Kegiatan aktivitas senam lapangan dan jalan jalan sehat

Satuan Biaya Konsumsi kegiatan lapangan terinci pada sebagai berikut :

Tabel 2.11
SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

| NO | URAIAN | SATUAN | MAKAN DAN MINUM |
|-----|---|------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kegiatan Penanganan Bencana Alam/Kegiatan Sosial/Aktivitas Lapangan | Dos | Rp 20.000 |
| 2 | Makan Minum Pasien/Petugas Rumah Singgah | Orang/Kali | Rp 15.000 |
| 3 | Makan Minum Pasien VIP | Orang/Kali | Rp 25.000 |
| 4 | Makan Minum Prolanis | Orang/Kali | Rp 15.000 |
| 5 | Makan Minum Kegiatan Senam/JJS | Orang/Kali | Rp 6.000 |

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

| NO | KABUPATEN | SATUAN | GEDUNG BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT | HALAMAN GEDUNG/TAMAN |
|-----|--------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | KAB. SAMPANG | M2/Tahun | Rp 150.000 | Rp 120.000 | Rp 10.000 |

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya terinci pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|--------------------------|------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kepala Daerah/Ketua DPRD | Unit/Tahun | Rp 41.900.000 |
| 2 | Pejabat Eselon II | Unit/Tahun | Rp 20.000.000 |

Tabel 2.14
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN SPEED BOAT

| URAIAN | SATUAN | RODA TIGA | RODA EMPAT | DOUBLE GARDAN/BUS MINI | BUS/TRUCK | SPEED BOAT |
|--------|--------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kendaraan Dinas Operasional | Unit/TH | Rp. 3.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 15.000.000 |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel berikut :

Tabel 2.15
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Inventaris Kantor / Mebelair | Pegawai/Tahun | Rp 80.000 |
| 2 | Personal Komputer | Unit/Tahun | Rp 350.000 |
| 3 | Printer | Unit/Tahun | Rp 300.000 |
| 4 | Server | Unit/Tahun | Rp. 1.000.000 |
| 5 | AC Split | Unit/Tahun | Rp 500.000 |
| 6 | Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | Rp 7.190.000 |
| 7 | Genset 75 KVA | Unit/Tahun | Rp 8.640.000 |
| 8 | Genset 100 KVA | Unit/Tahun | Rp 10.150.000 |
| 9 | Genset 125 KVA | Unit/Tahun | Rp 10.780.000 |
| 10 | Genset 150 KVA | Unit/Tahun | Rp 13.260.000 |
| 11 | Genset 175 KVA | Unit/Tahun | Rp 14.810.000 |
| 12 | Genset 200 KVA | Unit/Tahun | Rp 15.850.000 |
| 12 | Genset 250 KVA | Unit/Tahun | Rp 16.790.000 |
| 13 | Genset 275 KVA | Unit/Tahun | Rp 17.760.000 |
| 14 | Genset 300 KVA | Unit/Tahun | Rp 20.960.000 |
| 15 | Genset 350 KVA | Unit/Tahun | Rp 22.960.000 |
| 16 | Genset 450 KVA | Unit/Tahun | Rp 25.620.000 |
| 17 | Genset 500 KVA | Unit/Tahun | Rp 31.770.000 |

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI